

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang berusaha meningkatkan perekonomian nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan di setiap daerah. Pembangunan ekonomi melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan. Tetapi tingginya pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk Indonesia akan menghambat pembangunan apabila tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja serta peningkatan mutu angkatan kerja, sehingga akan menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur.

Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian, meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, sehingga akan meningkatkan beban masyarakat yang merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan

keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Depnakertrans, 2004).

Pemerintah atau pihak swasta mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menyediakan lapangan kerja baru. Kondisi ini membuat pemerintah berusaha memperluas dan menciptakan kesempatan kerja baru dalam rangka menampung pertambahan tenaga kerja guna mengurangi pengangguran, yaitu melalui pembangunan di segala sektor.

Sementara itu keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini karena usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan pendapatan antar golongan dan antar pelaku usaha, tetapi juga pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Sebagai pilar dari ekonomi kerakyatan, keberadaan UMKM menjadi tumpuan bagi sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Sektor UMKM yang memiliki karakteristik jumlah modal yang relatif lebih sedikit dan tidak menghendaki tingkat ketrampilan yang tinggi menjadikan jumlahnya menjadi sangat besar dan secara otomatis mendonorkan penyerapan tenaga kerja yang banyak. Fenomena ini tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi berlangsung di negara-negara lain, khususnya di negara berkembang (Yustika, 2002).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun

setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

Bila mengacu kepada UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM), konsep usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki banyak pengertian: pertama, usaha yang didirikan untuk tujuan kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan nirlaba; kedua, usaha yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan atau laba dari usaha; ketiga, usaha yang mandiri atau berdiri sendiri bukan bagian, cabang, ataupun afiliasi dari usaha lain; dan keempat, usaha yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha.

Karakteristik UMKM yang mudah dibentuk serta mudah dibubarkan menyebabkan jumlah unit UMKM sangat dinamis. UMKM menjadi salah satu sasaran kebijakan pemerintah di berbagai wilayah di Indonesia. UMKM diharapkan dapat membantu penyerapan tenaga kerja, mengingat sebagian besar UMKM sifatnya padat karya, sehingga pertumbuhan UMKM mempunyai dampak yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama di daerah padat penduduk seperti Jawa Barat yang merupakan propinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia. Umumnya tenaga kerja yang diserap oleh UMKM adalah tenaga kerja yang berpendidikan setingkat SLTA dan tingkat pendidikan dibawahnya.

Keunggulan UMKM dibandingkan dengan usaha besar, yaitu: inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk, berbasis pada sumber daya lokal sehingga dapat memanfaatkan potensi secara maksimal dan memperkuat kemandirian, kemampuan menciptakan lapangan kerja cukup banyak atau penyerapan tenaga kerja, fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan dalam skala besar yang pada umumnya birokratis, terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan, dimiliki dan dilaksanakan oleh masyarakat lokal sehingga mampu mengembangkan sumber daya manusia, dan tersebar dalam jumlah yang banyak sehingga merupakan alat pemerataan pembangunan yang efektif (Azrin,2004).

Dari tabel 1.1 dapat dilihat jumlah unit usaha dan tenaga kerja pada industri kecil menengah kabupaten di di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016, Kabupaten Bandung memiliki jumlah tenaga kerja pada industri kecil menengah yang cukup banyak. Bila diurutkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dari kabupaten yang ada di Jawa Barat, data tersebut menunjukkan jumlah tenaga kerja pada industri kecil menengah Kabupaten Bandung menjadi yang terbanyak diantara kabupaten lainnya yang ada di Jawa Barat yaitu 261.405 tenaga kerja dengan unit usaha sebanyak 4.192. Itu berarti bahwa Kabupaten Bandung memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian pada sektor industri kecil menengah atau UMKM di Provinsi Jawa Barat. Meskipun jumlah unit usahanya bukan yang terbanyak, tetapi UMKM di Kabupaten Bandung dapat menyerap tenaga kerja dengan angka yang tertinggi di Jawa Barat.

Tabel 1.1

Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja Industri Kecil Menengah Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

No	Kabupaten	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)
1	KAB. BANDUNG	4.192	261.405
2	KAB. TASIKMALAYA	10.769	113.865
3	KAB. GARUT	12.205	49.410
4	KAB. CIREBON	50.475	34.362
5	KAB. SUKABUMI	11.261	25.900
6	KAB. INDRAMAYU	5.171	15.514
7	KAB. SUBANG	5.794	15.507
8	KAB. KUNINGAN	1.604	11.012
9	KAB. BOGOR	3.607	10.040
10	KAB. PURWAKARTA	1.118	7.926
11	KAB. CIAMIS	541	6.500
12	KAB. PANGANDARAN	4.142	3.794
13	KAB. KARAWANG	420	1.811
14	KAB. BANDUNG BARAT	102	593
15	KAB. BEKASI	56	211
16	KAB. MAJALENGKA	38	115
17	KAB. CIANJUR	10	59
18	KAB. SUMEDANG	677	-
Jumlah		112.182	558.024

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat

Kabupaten Bandung memiliki 31 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Soreang. Dapat dilihat dari tabel 1.2 (lampiran) jumlah penduduk usia produktif menurut kecamatan di Kabupaten Bandung tahun 2016. Kabupaten Bandung memiliki jumlah penduduk usia produktif sebanyak 2.379.411 jiwa dan di antaranya terdapat 76.610 jiwa angkatan kerja di Kecamatan Soreang dengan kontribusi sebesar 3%.

Sebagai Ibu Kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung, Kecamatan Soreang merupakan salah satu titik sentral transportasi di Bandung Selatan. Infrastruktur jalan sudah sangat baik sebagai contohnya adalah Tol Soroja. Dengan

adanya Tol Soroja dapat membantu memutar roda perekonomian khususnya di Kecamatan Soreang itu sendiri. Kecamatan Soreang dikenal memiliki jumlah industri kain yang terbanyak di Kabupaten Bandung dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Industri kain turut mempunyai andil dalam menyerap tenaga kerja di Kecamatan Soreang.

Usaha penyerapan tenaga kerja tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja seperti perkembangan jumlah penduduk, angkatan kerja, produktifitas tenaga kerja, sumber daya manusia yang memadai, serta kebijakan tentang penyerapan tenaga kerja. Di samping penyerapan tenaga kerja tidak bisa mengabaikan peran dari usaha-usaha yang mampu menyerap tenaga kerja serta mampu memberikan produktifitas yang tinggi melalui kebijakan-kebijakan yang ada. Salah satu cara untuk menyerap tenaga kerja adalah dengan cara pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah atau dari peran industri. Pengembangan tersebut dapat terwujud melalui program kebijakan yang dilakukan oleh swasta atau pemerintah. Pengembangan usaha-usaha tersebut dapat memicu tingkat produksi yang tinggi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja baru.

Dari tabel 1.3, industri kain yang didalamnya termasuk usaha konveksi mengalami perkembangan jumlah unit usahanya. Di tahun 2013 Kecamatan Soreang memiliki jumlah industri kecil kain sebanyak 989 unit usaha dan pada tahun 2016 jumlah unit usaha bertambah menjadi 1.057 unit usaha.

Usaha kecil atau usaha konveksi di Kecamatan Soreang tersebar di 10 kelurahan. Agar penelitian lebih terfokus pada permasalahan yang dibahas, maka

diberi batasan ruang lingkup penelitian, yaitu pada UMKM konveksi di Kelurahan Soreang. Kelurahan Soreang dipilih sebagai objek penelitian memiliki jumlah unit usaha konveksi yang paling besar diantara kelurahan yang lain yaitu sebanyak 196 unit usaha pada tahun 2013 dan pada tahun 2016 jumlahnya bertambah menjadi 205 unit usaha. UMKM konveksi di Kelurahan Soreang berdiri dan berkembang sejak tahun 90an dan kebanyakan diantaranya adalah usaha turun temurun dengan tenaga kerja yang sebagian besar berasal dari keluarga pengusaha itu sendiri.

Tabel 1.3

Jumlah Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga Menurut Desa di Kecamatan Soreang Tahun 2016

No	Desa	Industri Kain	
		2013	2016
1	Soreang	196	205
2	Pamekaran	195	199
3	Sadu	157	165
4	Panyirapan	137	147
5	Sukajadi	125	128
6	Karamatmulya	65	79
7	Parungserab	60	65
8	Cingcin	35	42
9	Sukanagara	15	19
10	Sekarwangi	4	8
Jumlah		989	1.057

Sumber : BPS Kecamatan Soreang 2014 dan 2017

Permasalahan UMKM secara umum, diantaranya terbatasnya modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi (Sudaryanto dan Hanim, 2012). Pengelolaan UMKM bersifat *income gathering* yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang

memiliki akses permodalan (*bankable*), dan tidak ada pemisahan antara modal usaha dengan kebutuhan pribadi. Menurut Wiku Suryomurti (2011) bahwa kelemahan dan permasalahan yang dihadapi UMKM berdasarkan prioritasnya adalah 1) Kurangnya permodalan, 2) Kesulitan dalam pemasaran, 3) Persaingan usaha yang ketat, 4) Kesulitan bahan baku, 5) Kurang teknis produksi dan keahlian, 6) Kurangnya keterampilan manajerial (SDM), 7) Kurangnya pengetahuan dalam masalah manajemen termasuk dalam keuangan dan akuntansi.

Berbagai kelemahan yang dihadapi UMKM mengakibatkan sulitnya UMKM mempertahankan diri tetap eksis secara kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu perlu adanya *political will* pemerintah untuk melakukan pemberdayaan UKMM didukung pembiayaan yang memadai, khususnya yang berkaitan dengan upaya mengatasi pengangguran dan pengentasan kemiskinan (Sukidjo, 2004). Dengan jumlah yang ada saat ini maka diperlukan pembinaan atau pengelolaan baik dari pemilik usaha maupun atas bantuan pemerintah. Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah.

Modal sangat berperan penting dalam kegiatan UMKM, karena bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lebih tinggi yang akan mengakibatkan surplus yang lebih besar, sehingga mempengaruhi proses investasi pada sektor yang satu dengan yang lainnya. Dengan modal yang cukup, UMKM dapat meningkatkan produksinya. Peningkatan produksi dapat meningkatkan kesempatan kerja sehingga mempengaruhi penyerapan kerja. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Yang menjadi persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaannya memang sangat diperlukan, akan

tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar (Amirullah, 2005:7)

Menurut Handoko (dikutip dari Zamrowi, 2007), faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah tingkat upah. Selama ini masalah yang sering timbul dalam hal pengupahan adalah adanya perbedaan pengertian dan kepentingan mengenai upah antara pengusaha dan pekerja. Pemberian upah minimum yang layak diharapkan pekerja dapat memenuhi kebutuhan gizinya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, tetapi bila ditinjau dari teori ekonomi klasik dan neoklasik bahwa penetapan upah minimum bukan dianggap kebijakan yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, yang menjadi permasalahan utama UMKM konveksi di Kelurahan Soreang adalah modal, sulit memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar, harga bahan baku, upah, kemampuan SDM, dan masih kurangnya peran pemerintah untuk mengembangkan peran industri kecil dan menengah di dalam penyerapan tenaga kerja.

Untuk masalah modal tetap, nilai rata-rata modal tetap yang dimiliki pengusaha UMKM konveksi di Kelurahan Soreang adalah Rp. 400.000.000. Sedangkan untuk modal kerja yang diperlukan pengusaha UMKM di Kelurahan Soreang dalam setiap bulannya adalah Rp. 180.000.000, yang digunakan untuk pembelian bahan baku, biaya operasional (listrik, bbm, dan lain-lain), upah pekerja dan lain-lain. Dengan nilai sebesar itu, cukup sulit bagi pengusaha konveksi kecil untuk bisa mengembangkan usahanya karena kesulitan untuk mendapatkan modal yang diperlukan.

Kemampuan UMKM konveksi dalam memberi upah pekerja sering kali tidak sesuai dengan jumlah upah yang diminta oleh pekerja, sehingga banyak pekerja yang memilih pindah ke industri yang lebih besar atau pergi merantau untuk mendapatkan upah yang diinginkan. Upah yang diberikan terhadap pekerja tergantung dari produktivitas dari pekerja itu sendiri atau sistem pengupahan yang tidak tetap. Rata-rata upah dari tenaga kerja di sentra UMKM konveksi Kelurahan Soreang adalah sebesar Rp. 1.800.000 per bulan dan itu masih dibawah dari upah minimum kabupaten / kota (UMK) Kabupaten Bandung pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. Rp 2.678.028,98 akan tetapi, sudah melebihi tingkat upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 1.544.360. Pada momen tertentu seperti misalnya pada saat memasuki Bulan Ramadhan, upah yang diterima tenaga kerja di sentra UMKM konveksi di Kelurahan Soreang dapat melebihi UMK Kab. Bandung karena tingginya permintaan terhadap pakaian pada saat memasuki Bulan Ramadhan sehingga meningkatkan produksi dan mendapatkan upah yang lebih juga, karena sistem pembayaran upah tenaga kerja di sentra UMKM konveksi di Kelurahan Soreang adalah upah per unit output yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja.

Selain itu, masalah kualitas dan kemampuan SDM cukup menghambat produksi. Sebagian besar pekerja pada sentra UMKM konveksi di Kelurahan Soreang tidak memiliki kemampuan di bidang konveksi pada awalnya dan mendapatkan keahlian secara otodidak seperti menjahit, membuat pola, dan sebagainya. Hal tersebut cukup menghambat produksi UMKM karena tidak bisa dikerjakan secara optimal.

Para pengusaha UMKM konveksi di Kelurahan Soreang juga belum bisa memperbesar pangsa pasar mereka yang hanya terpaku pada pasar-pasar konvensional, contohnya: Pasar Tanah Abang di Jakarta dan Pasar baru di Bandung. Pasar *online* yang saat ini sangat berkembang belum bisa mereka masuki, karena tidak mengetahui cara untuk berjualan dan bersaing di pasar *online*. Peran Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mempromosikan produk UMKM konveksi di Kelurahan Soreang pun dinilai masih kurang membantu untuk memasarkan produk UMKM konveksi tersebut. Harga bahan baku yang dari hari ke hari semakin mahal menjadi permasalahan tersendiri bagi pengusaha UMKM konveksi di Kelurahan Soreang. Seringkali para pengusaha mengurangi jumlah produksinya agar biaya produksi yang dikeluarkann tidak terlalu besar. Lama usaha juga menjadi salah satu masalah disana, karena konsumen biasanya memilih unit UMKM konveksi yang sudah lama beroperasi karena dianggap lebih mempunyai kemampuan dan berpengalaman dalam memproduksi barang. Kesulitan ini cukup menyulitkan para pengusaha baru untuk bersaing di pasar yang sama apabila tidak mempunyai kemampuan dan kualitas yang setara dengan UMKM yang sudah lama beroperasi, sehingga apabila para pengusaha UMKM konveksi baru di Kelurahan Soreang tidak bisa mempunyai kemampuan dan kualitas yang setara maka UMKM mereka tidak dapat berkembang karena kesulitan bersaing dengan UMKM yang sudah lama.

Maka dari itu, berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah (skripsi) dengan judul **“ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA USAHA**

MENENGAH KECIL MIKRO (UMKM) KONVEKSI DI KELURAHAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi tenaga kerja pada sentra UMKM konveksi di Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana pengaruh modal, upah, jumlah produksi dan lama usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada sentra UMKM konveksi di Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi tenaga kerja pada sentra UMKM konveksi di Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh modal, upah, dan jumlah produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sentra UMKM konveksi di Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung

1. Membantu Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengambil kebijakan daerah
2. Membantu menganalisis sebuah permasalahan daerah.

b. Bagi penulis

1. Memperoleh pengalaman yang berharga guna mempersiapkan diri untuk memasuki dunia usaha kerja.
2. Memberikan wawasan.

c. Bagi Institusi Pendidikan

1. Institusi pendidikan memperoleh masukan guna pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.
2. Sebagai salah satu alat evaluasi terhadap kurikulum yang berlaku.

d. Bagi Pembaca

1. Mengetahui bagaimana penyerapan tenaga kerja yang terjadi pada industri konveksi di Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja karena tenaga kerja dibutuhkan untuk membantu memproduksi barang atau jasa yang kemudian barang atau jasa tersebut dijual ke masyarakat.

Permintaan tenaga kerja menjelaskan tentang hubungan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki dengan tingkat upah. Permintaan pengusaha atas jumlah tenaga kerja yang diminta karena orang tersebut dapat meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diproduksi dan kemudian dijual kepada konsumen. Adanya penambahan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja bergantung kepada penambahan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang diproduksi (Simanjuntak, 2001).

Dengan kata lain penambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tersebut tergantung dari penambahan permintaan masyarakat akan barang atau jasa. Oleh karena itu permintaan tenaga kerja disebut juga sebagai *derived demand* (permintaan yang ditimbulkan oleh permintaan lain) (Borjas, 2010: 88). Permintaan tenaga kerja merupakan fungsi dari harga tenaga kerja (upah) dan harga faktor-faktor produksi lainnya.

Teori lain tentang permintaan tenaga kerja diturunkan dari fungsi produksi suatu aktivitas ekonomi. Produksi merupakan transformasi dari input atau masukan (faktor produksi) kedalam output atau keluaran. Mankiw (2003:49) mengasumsikan

bahwa suatu proses produksi hanya menggunakan dua jenis faktor produksi yaitu tenaga kerja (L) dan modal (K).

2.1.1.1 Fungsi Permintaan Tenaga Kerja

Pada saat seorang pengusaha akan menambah atau mengurangi jumlah tenaga kerjanya, maka yang harus dipertimbangkan adalah:

- 1) Menghitung tambahan output yang akan diperoleh pengusaha sehubungan penambahan satu orang tenaga kerja atau memperkirakan MPPL (*marginal physical product of labor*) dari karyawan.
- 2) Menghitung berapa tambahan pendapatan pengusaha karena adanya tambahan output yang disebabkan tambahan satu karyawan atau *marginal revenue product* (MRP atau MR), dimana:

$$MR = MPPL \times P$$

Dimana:

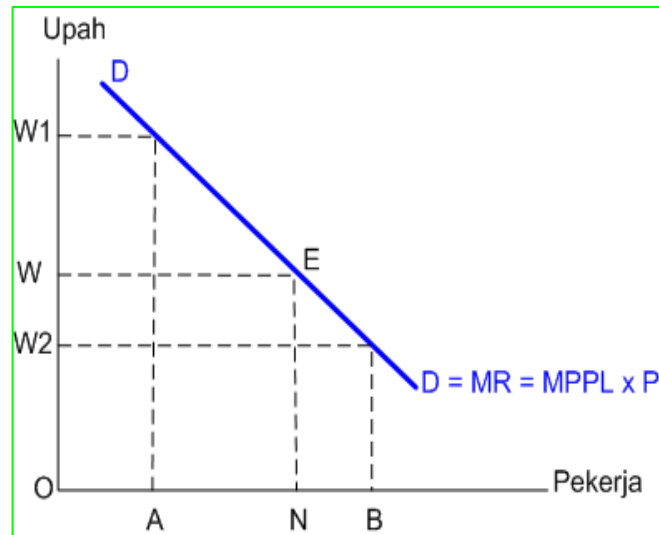
P = harga

MPPL = nilai marginal pekerja

- 3) Membandingkan nilai MR dengan biaya yang harus dikeluarkan pengusaha untuk membayar tambahan satu karyawan tersebut atau *marginal cost* (MC). Dimana MC = tingkat upah per karyawan (*wage* = W) Bila $MR > MC$ berarti tambahan satu karyawan menguntungkan pengusaha. Sepanjang $MR > MC$ maka pengusaha akan terus menambah karyawannya.

Jika tenaga kerja terus ditambah sedangkan alat-alat faktor produksi lainnya tetap, maka perbandingan antara alat-alat produksi untuk setiap pekerja menjadi

lebih kecil dan akan menyebabkan tambahan output per pekerja (MPPL) juga semakin kecil atau yang dikenal dengan *the law of diminishing marginal returns*.



Gambar 2.1 Kurva Fungsi Permintaan Tenaga Kerja

Kurva DD menunjukkan kurva permintaan tenaga kerja. *The law of diminishing marginal returns* digambarkan oleh garis DD yang memiliki slope negatif, dimana garis DD menunjukkan nilai marginal produk pekerja (MPPL). Misal pada titik E1 upah yang berlaku = W dan jumlah pekerja sebanyak $OA = 100$ orang, maka nilai hasil kerja pekerja yang ke 100 = $MR = MPPL \times P = W1$, karena $W1 > W$ maka pengusaha akan menambah pekerja baru.

Pengusaha dapat terus menambah Pekerja sampai dengan ON. Di titik E pengusaha mencapai laba maksimum dengan nilai $MR = MPPL \times P = W = MC$.

Penambahan pekerja lebih besar dari ON, misalkan OB atau pada titik E2 akan mengurangi keuntungan pengusaha, karena nilai upah yang diberikan (W) lebih besar dari nilai marginal pekerjanya ($W2$).

Fungsi permintaan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya akan berbeda tergantung dari tingkat produktivitas masing-masing faktor produksi dan tingkat efisiensi dari setiap perusahaan.

2.1.1.2 Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja

Elastisitas permintaan tenaga kerja adalah suatu ukuran yang mengukur persentase perubahan permintaan tenaga kerja yang disebabkan adanya perubahan satu persen tingkat upah, yang dirumuskan sbb:

$$e = \frac{\% \Delta N}{\% \Delta W} = \frac{\Delta N / N}{\Delta W / W} = \frac{\Delta N}{\Delta W} \times \frac{W}{N}$$

Dimana: e = elastisitas permintaan tenaga kerja

N = jumlah tenaga kerja awal

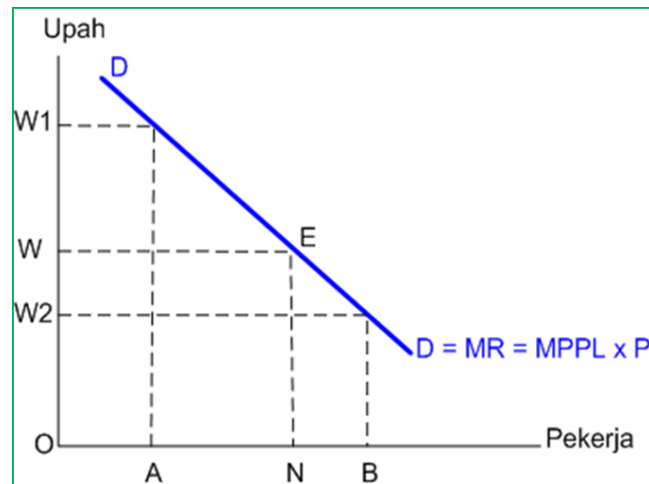
W = tingkat upah yang sedang berlaku

ΔN = perubahan jumlah tenaga kerja

ΔW = perubahan tingkat upah

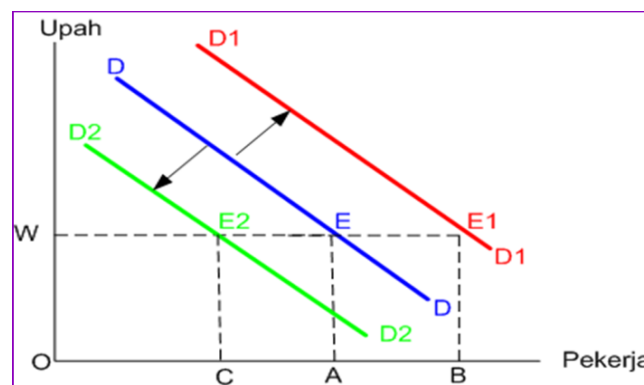
2.1.1.3 Penambahan dan Pergeseran Permintaan Tenaga Kerja

Perubahan permintaan tenaga kerja yang terjadi karena perubahan tingkat upah akan menyebabkan perubahan permintaan tenaga kerja yang terjadi sepanjang garis/kurva permintaan. Misalnya dalam gambar 2.1 jika upah meningkat dari W menjadi W1 maka permintaan tenaga kerja menurun dari ON menjadi OA atau perpindahan dari titik E ke titik E1. Apabila upah turun dari W ke W2 maka permintaan tenaga kerja meningkat dari ON menjadi OB atau perpindahan dari titik E ke E2.



Gambar 2.2 Perubahan Permintaan Tenaga Kerja Karena Perubahan Tingkat upah

Sesuai perkembangan waktu dalam jangka panjang perubahan permintaan tenaga kerja dapat terjadi karena perubahan produksi secara besar-besaran peningkatan produktivitas dan perubahan teknologi. Perubahan-perubahan ini akan menyebabkan pergeseran (*shift*) kurva secara keseluruhan.



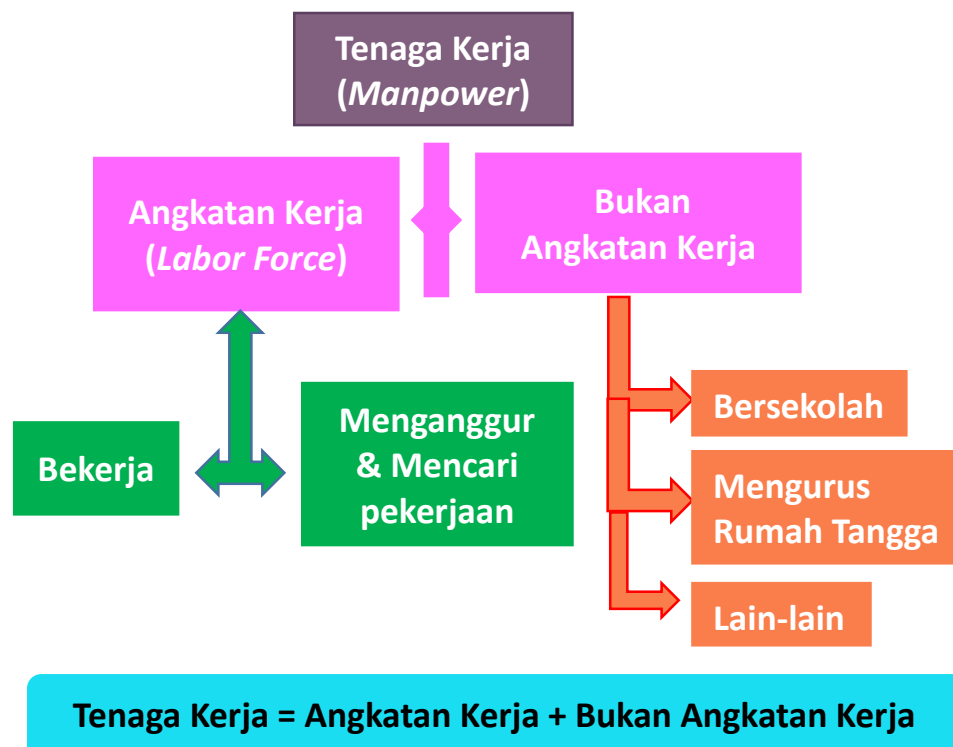
Gambar 2.3 Perubahan Permintaan Tenaga Kerja Karena Faktor Selain Upah

Dalam gambar pertambahan permintaan tenaga kerja yang disebabkan karena pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas dan perubahan teknologi diperlihatkan oleh pergeseran kurva permintaan tenaga kerja DD menjadi D1D1 atau pergeseran titik E ke E1.

Sebaliknya pengurangan permintaan tenaga kerja sebagai dampak kelesuan ekonomi, peningkatan produktivitas dan perubahan teknologi menyebabkan kurva DD bergeser ke D2D2 atau pergeseran dari titik E ke E2.

2.1.2 Konsep, Pengelompokan dan Pengertian Tenaga Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan kerja.

Dalam suatu Negara penduduk berperan sebagai sumber daya manusia (SDM). Penduduk yang termasuk sebagai SDM adalah penduduk yang bertindak sebagai tenaga kerja atau penduduk yang berusia 15-64 tahun. Tenaga kerja terbagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, seperti pada bagan berikut:



Gambar 2.4 Pengelompokan Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja,

2.1.2.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (*actor*) dalam mencapai tujuan pembangunan (Sastrowardoyo, 2002), ada beberapa pengertian tenaga kerja menurut para ahli atau pihak yang langsung berhubungan dengan tenaga kerja, antara lain:

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi suatu kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut Mulyadi.S (2003) Tenaga Kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu wilayah yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan (Statistik UKM 2012:2).

Menurut BPS, tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Menurut Sumarsono (2009:3), tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja. Pengertian tenaga kerja ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keliarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka menggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja.

Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan pekerjaan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.

2.1.2.2 Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja (*employed*), atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (*unemployed*).

a. Penduduk yang bekerja

Penduduk yang bekerja adalah penduduk angkatan kerja yang benar-benar mendapat pekerjaan penuh, sedangkan pengangguran adalah penduduk usia kerja tetapi belum mendapatkan kesempatan bekerja.

Penduduk yang bekerja atau mempunyai pekerjaan adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. (Sensus Penduduk 2000, hal : xxi).

Penduduk yang bekerja didefinisikan juga sebagai bagian dari penduduk usia kerja atau penduduk 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. (Sensus Penduduk 2000, hal: xxi).

Menurut Sensus Penduduk 2000, Status Pekerjaan terdiri dari:

- Berusaha atau bekerja sendiri adalah yang berusaha/bekerja atas risiko sendiri dan tidak mempekerjakan pekerja keluarga maupun buruh.

Contohnya sopir taksi yang membawa mobil atas risiko sendiri, kuli-kuli di pasar, stasiun atau tempat-tempat lainnya yang tidak mempunyai majikan tertentu.

- Berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap adalah yang bekerja sebagai orang yang berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan buruh tidak tetap. Contohnya, pengusaha warung yang dibantu oleh anggota rumah tangganya atau orang lain yang diberi upah tidak tetap, penjaja keliling yang dibantu anggota rumah tangganya atau seseorang yang diberi upah hanya pada saat membantu saja.
- Berusaha dibantu dengan buruh tetap yang bekerja sebagai orang yang berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh tetap. Buruh tetap adalah buruh atau karyawan yang bekerja pada orang lain atau instansi / kantor / perusahaan dengan menerima upah atau gaji secara tetap, baik ada kegiatan maupun tidak.
- Buruh atau pekerja dibayar yang bekerja pada orang lain atau instansi / kantor / perusahaan dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.
- Pekerja tidak dibayar yang bekerja membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan seseorang dengan tidak mendapat upah atau gaji baik berupa uang maupun barang. Contohnya anggota rumah tangga seperti istri yang membantu suami di sawah dan bukan sebagai anggota rumah tangga tetapi masih keluarga seperti saudara yang membantu penjualan di warung.

Tingkat atau Angka Partisipasi Angkatan Kerja dihitung dengan rumus (TPAK atau APAK):

$$APK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja (bekerja + mencari pekerjaan)}}{\text{Jumlah Penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih}} \times 100 \%$$

$$APAK_{kel_umur} = \frac{\Sigma \text{Angkatan Kerja (bekerja + mencari pekerjaan) kelompok umur } i}{\Sigma \text{Penduduk pada kelompok umur } i} \times 100 \%$$

b. Pengangguran

Pengangguran Terbuka

Merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \bullet 100\%$$

Setengah Pengangguran

Bagian dari angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah pengangguran dibagi menjadi dua kelompok:

- a. Setengah Penganggur Terpaksa, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain.

- b. Setengah Penganggur Sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat besar.

Berdasarkan penyebabnya, pengangguran dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Pengangguran Friksional: terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan lowongan pekerjaan dengan pencari kerja. Hal ini seringkali disebabkan oleh banyak faktor, seperti kurang informasi, perbedaan tempat, dan ketidatepatan waktu.
2. Pengangguran Struktural: terjadi karena perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian. Misalnya perubahan struktur ekonomi dari agraris menjadi industri, akan menggeser kebutuhan tenaga kerja menjadi lebih banyak diperlukan tenaga kerja yang mempunyai keahlian di sektor industri daripada sektor pertanian.
3. Pengangguran Musiman: terjadi karena pergantian musim. Misalnya di daerah pertanian, di luar musin tanam dan panen, banyak orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan mereka digolongkan sebagai penganggur musiman.

2.1.2.3 Bukan Angkatan Kerja

Menurut BPS bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja, atau mencari pekerjaan. Yang termasuk didalam kelompok bukan angkatan kerja adalah:

1. Masih bersekolah
2. Mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah
3. Lain-lain, yaitu:
 - a. Penerima pendapatan, yaitu mereka yang tidak melakukan kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan, seperti tunjangan pensiun, bunga tabungan, sewa atas milik, dan
 - b. Mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain, misalnya lansia, cacat, nabi, atau karena sakit.

Pada dasarnya yang termasuk dalam kelompok bukan pekerja ini (kecuali kelompok yang hidupnya tergantung dari orang lain) sewaktu-waktu dapat bekerja. Oleh sebab itu kelompok ini sering disebut sebagai angkatan kerja potensial (*potential labor force*).

2.1.3 Pengertian UMKM

Ada beberapa pengertian UMKM menurut para ahli atau pihak yang langsung berhubungan dengan UMKM, antara lain:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
- b. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- c. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga

kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

3. Menurut Kementrian Keuangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

2.1.3.1 Klasifikasi UMKM

Suatu komite untuk pengembangan ekonomi mengajukan konsep tentang Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UKMM), dengan lebih menekankan pada kualitas atau mutu dari pada kriteria kuantitatif untuk membedakan perusahaan usaha kecil menengah dan besar. Ada empat aspek yang dipergunakan dalam konsep UMKM tersebut, yaitu pertama, kepemilikan, kedua operasinya terbatas pada lingkungan atau kumpulan pemodal; ketiga, wilayah operasinya terbatas pada lingkungan sekitar, meskipun pemasaran dapat melampaui wilayah lokalnya; keempat, ukuran dari perusahaan lainnya dalam bidang usaha yang sama. Ukuran yang dimaksud bisa jumlah pekerjaan atau karyawan atau satuan lainnya yang signifikan (Partom dan Soejodono, 2004).

Menurut Rahmana (2009), UMKM dapat diklasifikasi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

- 1) *Livelihood activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Dynamic Enterprice*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub kontrak dan ekspor.

2.1.3.2 Peran UMKM

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terstruktur dengan arah produktivitas dan daya saing adalah tujuan dan peran UMKM dalam menumbuhkan wirausahawan yang tangguh. Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran:

- 1) Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi
- 2) Penyedia lapangan kerja terbatas
- 3) Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta kontribusinya terhadap neraca pembayaran (Departemen Koperasi, 2008).

Karakteristik UMKM ini, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA, *The Center for Econmic and Social Studies* (CESS) pada tahun 2000,

adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UMKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi.

2.1.4 Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Industri menurut UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dikatakan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah. Kemudian bahan baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Sedangkan tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Dari pengertian tekstil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bahan/produk tekstil meliputi produk serat, benang, kain, pakaian dan berbagai jenis benda yang terbuat dari serat. Jadi industri tekstil adalah industri yang mengolah serat menjadi benang kemudian menjadi busana, baik itu busana muslim atau lainnya.

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) secara teknis dan struktur terbagi dalam tiga sektor industri yang lengkap, vertikal dan terintegrasi dari hulu sampai hilir, yaitu:

1. Sektor Industri Hulu (*upstream*), adalah industri yang memproduksi serat/fiber dan proses pemintalan (*spinning*) menjadi produk benang. Industrinya bersifat padat modal, berskala besar, jumlah tenaga kerja relatif kecil dan output pertenagakerjanya besar.
2. Sektor Industri Menengah (*midstream*), meliputi proses penganyaman benang menjadi kain mentah lembaran melalui proses pertenunan dan rajut yang kemudian diolah lebih lanjut melalui proses pengolahan pencelupan, penyempurnaan (*finishing*) dan pencetakan (*printing*) menjadi kain-jadi. Sifat dari industrinya semi padat modal, teknologi madya dan modern – berkembang terus, dan jumlah tenaga kerjanya lebih besar dari sektor industri hulu.
3. Sektor Industri Hilir (*downstream*), adalah industri manufaktur pakaian jadi termasuk proses pemotongan, jahit, pencucian dan penyempurnaan yang menghasilkan pakaian jadi siap pakai. Pada sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja sehingga sifat industrinya adalah padat karya.

Komoditi Industri (TPT) berdasarkan ekspor dengan *harmonize system* (HS) adalah sebagai berikut:

- Serat, yaitu serat alami (sutra, wool, katun) dan serat buatan.
- Benang, yaitu sutra, wool, katun, filamen, dan staple fiber.
- Kain, yaitu woven (sutra, wool, katun, filamen, staple),
- Pakaian jadi (garment) dari rajutan and non-rajutan.
- Lainnya, yaitu karpet, label, badges, dll.

2.1.5 Teori Produksi

Secara umum, produksi dapat diartikan sebagai kegiatan optimalisasi dari faktor – faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan lain – lainnya oleh perusahaan untuk menghasilkan produk berupa barang – barang dan jasa – jasa. Secara teknis, kegiatan produksi dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa input untuk menghasilkan sejumlah output. Dalam pengertian ekonomi, produksi didefinisikan sebagai usaha manusia untuk menciptakan atau menambah daya atau nilai guna dari suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan pada kepentingan produsen, tujuan produksi adalah untuk menghasilkan barang yang dapat memberikan laba. Tujuan tersebut dapat tercapai, jika barang atau jasa yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sasaran kegiatan produksi adalah melayani kebutuhan masyarakat atau untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat umum. Dengan demikian produksi itu tidak terbatas pada pembuatannya saja tetapi juga penyimpanannya, distribusi, pengangkutan, pengeceran, pemasaran kembali, upaya – upaya mensiasati lembaga regulator atau mencari celah hukum demi memperoleh keringanan pajak atau lainnya.

Produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai suatu objek atau membuat objek baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah kegunaan suatu objek tanpa mengubah bentuknya disebut produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah kegunaan suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuk yang disebut produksi barang. Menurut Sugiarto (2007) produksi adalah kegiatan yang mengubah input menjadi output. Dalam kegiatan ekonomi biasanya dinyatakan dalam produksi. Sadono Sukirno (2010) menjelaskan

bahwa fungsi produksi merupakan sifat hubungan diantara faktor – faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor produksi dikenal pula dengan istilah input dan jumlah produksi selalu juga disebut sebagai output.

Faktor – faktor produksi yang digunakan bersamaan dengan cara tertentu sehingga membuat produktivitas masing – masing faktor bergantung pada jumlah faktor produksi lainnya yang tersedia untuk digunakan dalam proses produksi lainnya (Mankiw, 2009 : 504).

Faktor – faktor produksi selain tenaga kerja yaitu tanah, modal dan mesin / teknologi, pengertian istilah tenaga kerja dan tanah telah jelas, namun definisi modal merupakan sesuatu yang rumit. Para ekonom menggunakan istilah modal (*capital*) untuk mengacu pada stok berbagai peralatan dan struktur yang digunakan dalam produk. Artinya modal ekonomi mencerminkan akumulasi barang yang dihasilkan dimasa lalu yang sedang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang baru (Mankiw, 2009:501).

Kegiatan operasi merupakan bagian dari kegiatan organisasi yang melakukan transformasi dari masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*). Masukan berupa sumber daya yang diperlukan seperti: modal, bahan baku dan tenaga kerja, sedangkan keluaran dapat berupa barang setengah jadi maupun barang jadi dan jasa.

2.1.5.1 Fungsi Produksi

Fungsi produksi menurut Robert S Pindyck dan Daniel L Rubinfeld dalam buku Mikroekonomi menyatakan dalam bentuk rumus, yaitu seperti berikut:

$$Q = f (K, L, R, T)$$

Dimana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja dan ini meliputi berbagai jenis tenaga kerjadan keahlian keusahawanan, R adalah kekayaan

alam, dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan. Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor – faktor produksi tersebut, yaitu secara bersama digunakan untuk memproduksi barang yang sedang dianalisis sifat produksinya.

Persamaan tersebut merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya berarti bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang berbeda – beda dengan sendirinya akan memerlukan berbagai faktor produksi tersebut dalam jumlah yang berbeda – beda juga. Di samping itu, untuk satu tingkat produksi tertentu dapat pula digunakan gabungan faktor produksi yang berbeda. Sebagai contoh, untuk memproduksi sejumlah hasil pertanian tertentu perlu digunakan tanah yang lebih luas apabila bibit unggul dan pupuk tidak digunakan tetapi luas tanah dapat dikurangi apabila pupuk dan bibit unggul dan teknik bercocok tanam modern digunakan. Dengan membandingkan berbagai gabungan faktor – faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah barang tertentu dapatlah ditentukan gabungan faktor produksi yang paling ekonomis untuk memproduksi sejumlah barang tersebut.

2.1.6 Teori Investasi

Menurut Sukirno (2002), investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Jadi investasi dalam perspektif makro adalah tindakan perusahaan dalam

membeli barang-barang modal dan bukan tindakan individu dalam pembelian barang-barang modal.

Sedangkan pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil, menurut Sukirno (2002), di dalam perekonomian makro kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Lalu peningkatan dalam permintaan agregat akan membawa perubahan pada kapasitas produksi suatu perekonomian yang kemudian akan diikuti oleh pertambahan dalam kebutuhan akan tenaga kerja untuk proses produksi, yang menandakan bertambahnya lapangan pekerjaan

Disamping harapan untuk memperoleh keuntungan di masa depan, terdapat beberapa faktor yang akan menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan oleh penanam modal dalam suatu perekonomian. Dimana faktor utama untuk menentukan tingkat investasi adalah sebagai berikut:

1. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh.
2. Tingkat bunga.
3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi dimasa akan datang
4. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
5. Keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Dengan demikian besarnya nilai investasi akan menentukan besarnya penyerapan tenaga kerja. Secara teoritis, semakin besar nilai investasi pada Industri Kecil dimana investasi yang dilakukan bersifat padat karya, sehingga kesempatan kerja yang diciptakan semakin tinggi (Sukirno, 1997:109)

Menurut Halim (2005:4) bila dilihat dari jenisnya, investasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu investasi riil dan investasi financial. Investasi riil yaitu

investasi terhadap barang-barang tahan lama (barang-barang modal) yang akan digunakan dalam proses produksi yang berbentuk asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan. Sedangkan investasi financial adalah investasi yang dilakukan di pasar modal, misalnya berupa surat-surat berharga, pembelian saham, obligasi dan surat bukti hutang lainnya. Kegiatan investasi dibedakan menjadi investasi yang sifatnya mempertahankan kekayaan yang sudah ada, dengan kata lain harus mengganti kekayaan/barang modal yang telah rusak, dan investasi yang sifatnya menambah barang modal, yaitu dengan cara membeli barang baru. Biasanya barang modal yang diganti adalah barang durable, dimana penggunaannya bersifat multi tahunan. Berkaitan dengan penggantian modal, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Umur teknis, yaitu kemampuan barang modal yang memberikan manfaat.
2. Umur ekonomis, yaitu dengan besarnya biaya operasional.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1.	M. Taufik Zamrowi (2007) "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada industri Kecil (Studi Kasus Industri Kecil Mebel di Kota Semarang)"	Tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal kerja, pengeluaran sebagai variabel bebas. Penyerapan Tenaga Kerja sebagai	Variabel upah, produktivitas dan non upah sentra berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Variabel modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Secara simultan atau bersamasama variabel non upah, modal, tingkat upah atau gaji dan produktivitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan.

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
		Variabel terikat.	Variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada industri kecil mebel di Kota Semarang adalah variabel modal
2.	Reza Adi Purnomo (2013) “Analisis Variabel – Variabel yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Kecil dan Menengah Anyaman Bambu di Kabupaten Banyuwangi”	Upah, modal dan omset sebagai variabel bebas Penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat.	Variabel upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan atau penyerapan tenaga kerja. Variabel tingkat upah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. Variabel modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Variabel omset penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja.
3.	Ni Made Santi Widiastuti (2014) “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus UKM Kerajinan di Kabupaten Gianyar)”	Upah, modal usaha nilai produksi dan lama usaha sebagai variabel bebas. Penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat.	Variabel modal yang dikeluarkan oleh pengusaha UKM Kerajinan di Kabupaten Gianyar berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Gianyar. Variabel upah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor UKM Kerajinan di Kabupaten Gianyar. Variabel nilai produksi berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor UKM Kerajinan di Kabupaten Gianyar. Variabel lama usaha berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor UKM Kerajinan di Kabupaten Gianyar.
4.	Nelsen Diyan Pratama (2012) “Analisis Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil di Jepara”	Penerimaan kredit, jenis usaha, pendidikan pengusaha dan lama usaha sebagai variabel bebas Penyerapan tenaga kerja	Variabel penerimaan kredit mempunyai hubungan tidak signifikan terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Variabel jenis usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Variabel pendidikan pengusaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Variabel usia usaha berpengaruh negatif

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
		sebagai variabel terikat.	dan signifikan terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

Sumber: Beberapa jurnal dalam beberapa tahun

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan peneliti terdahulu penyerapan tenaga kerja pada UMKM konveksi di Kelurahan Soreang dipengaruhi oleh modal, upah, lama usaha, dan jumlah produksi. Dengan kata lain pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tersebut tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat akan barang atau jasa. Oleh karena itu permintaan tenaga kerja disebut juga sebagai *derived demand* (permintaan yang ditimbulkan oleh permintaan lain). Permintaan tenaga kerja merupakan fungsi dari harga tenaga kerja (upah) dan harga faktor-faktor produksi lainnya.

Variabel Modal sangat berperan penting dalam kegiatan UMKM, karena bertujuan untuk meningkatkan produktifitas lebih tinggi yang akan mengakibatkan surplus yang lebih besar, sehingga mempengaruhi proses investasi pada sektor yang satu dengan yang lainnya. Dengan begitu kesempatan kerja semakin meningkat sehingga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja (Karib 2012:60). Menurut penelitian Purnomo (2013) modal berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga naik atau tidaknya modal usaha tidak akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Berbanding terbalik dengan penelitian Zamrowi (2007), modal berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja karena ketika modal usaha dinaikan, skala produksi akan meningkat dan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

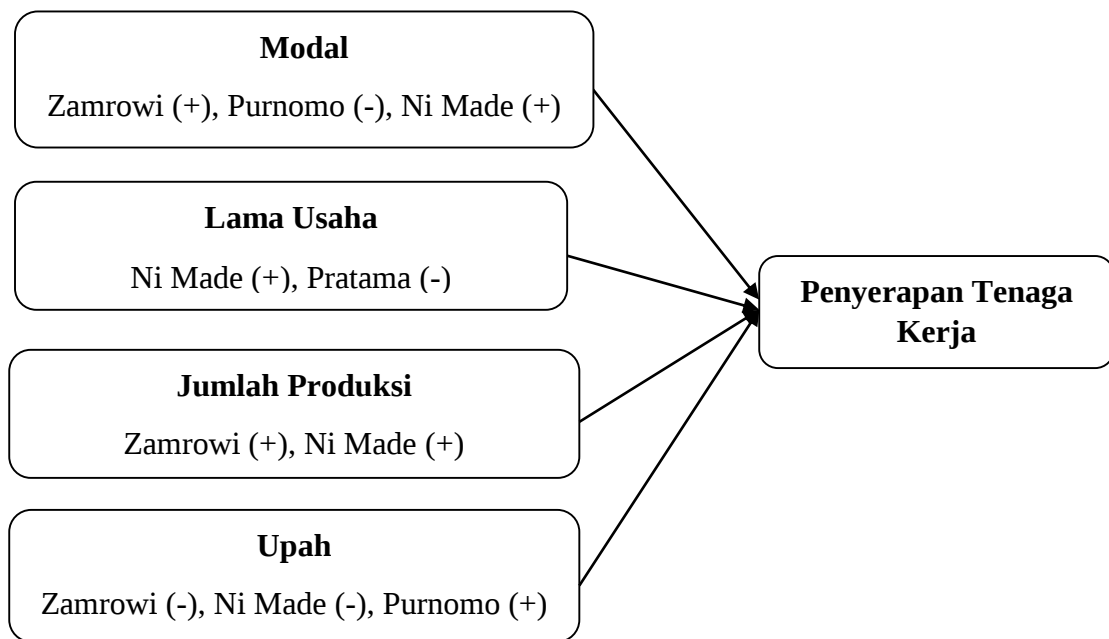
Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil (Sumarsono, 2003). Pemberian upah akan mempengaruhi tingkat produksi suatu usaha. Menurut Handoko (dikutip dari Zamrowi, 2007), faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah tingkat upah. Selama ini masalah yang sering timbul dalam hal pengupahan adalah adanya perbedaan pengertian dan kepentingan mengenai upah antara pengusaha dan pekerja. Pemberian upah minimum yang layak diharapkan pekerja dapat memenuhi kebutuhan gizinya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, tetapi bila ditinjau dari teori ekonomi klasik dan neoklasik bahwa penetapan upah minimum bukan dianggap kebijakan yang tepat.

Variabel upah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja menurut Purnomo (2013). Di dalam penelitiannya, hal ini dikarenakan keinginan masyarakat untuk bekerja sebagai penganyam bambu sangatlah kurang dan cenderung hanya dianggap sebagai pekerjaan sampingan. Hubungan positif yang terjadi ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam teori permintaan tenaga kerja, bahwa pada saat tingkat upah tenaga kerja meningkat akan terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang diminta, demikian pula sebaliknya dengan adanya peningkatan dalam permintaan jumlah tenaga kerja disebabkan karena adanya penurunan tingkat upah. Sehingga apabila terjadi peningkatan tingkat upah disebabkan perusahaan ingin menarik tenaga kerja lebih atau meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan menurut penelitian Zamrowi (2007) dan Ni

Made (2014), variabel upah memiliki pengaruh negatif karena semakin tinggi upah, semakin berkurang kemampuan usaha tersebut dalam menyerap tenaga kerja

UMKM konveksi di Kelurahan Soreang yang sudah ada sejak tahun 1990an dapat mempengaruhi penyerapan terhadap tenaga kerja. Semakin lama suatu UMKM berdiri, semakin banyak jumlah konsumen atau pelanggan yang dimiliki dibandingkan dengan UMKM yang baru berdiri. Sehingga jumlah produksi yang dihasilkan lebih banyak dan penyerapan terhadap tenaga kerja pun lebih banyak. Namun dalam penelitian Pratama (2012), lama usaha berpengaruh negatif terhadap permintaan tenaga kerja. Dalam penelitiannya semakin lama usaha berdiri semakin sedikit permintaan tenaga kerja. Berbeda dengan hasil penelitian Ni Made (2013), lama usaha berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Permintaan pengusaha atas jumlah tenaga kerja yang diminta karena orang tersebut dapat meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diproduksi dan kemudian dijual kepada konsumen. Adanya penambahan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja bergantung kepada penambahan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang diproduksi (Simanjuntak, 2001). Karena ketika jumlah produksi naik, maka biaya produksi per unit akan menurun, pengusaha dapat menurunkan harga jual barang, oleh sebab itu permintaan masyarakat akan bertambah dan penambahan permintaan barang ini akan mendorong penambahan produksi dan selanjutnya akan menambah permintaan akan tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan penelitian Ni Made (2014) dan Zamrowi (2007) yang menilai jumlah produksi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diduga Modal berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
2. Diduga Upah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.
3. Diduga Jumlah Produksi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.
4. Diduga Lama Usaha berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Kecamatan Soreang merupakan salah satu titik sentral transportasi di Bandung Selatan, terutama semenjak tol Soroja resmi dibuka. Dengan dibukanya tol Soroja, para pelaku UMKM konveksi yang ada di Kecamatan Soreang menjadi terbantu dalam hal pendistribusian. Hal tersebut tidak hanya membantu sentra UMKM konveksi tetapi juga dengan UMKM lainnya yang ada di Kecamatan Soreang menjadi lebih berkembang.

Dari table 3.1 dapat dilihat Kecamatan Soreang memiliki jumlah penduduk sebanyak 117,021 jiwa yang terdiri dari 59,773 jiwa laki-laki dan 57,248 jiwa perempuan.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Soreang Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2016

No	Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sadu	5.717	5.381	11.098
2	Sukajadi	4.076	3.918	7.994
3	Sukanagara	2.725	2.687	5.412
4	Panyirapan	3.766	3.640	7.406
5	Karamatmulya	4.346	4.091	8.437
6	Soreang	10.790	10.074	20.864
7	Pamekaran	7.484	7.265	14.749
8	Parungserab	4.390	4.217	8.607
9	Sekarwangi	3.945	3.879	7.824
10	Cingcin	12.534	12.096	24.630
Kecamatan Soreang		59.773	57.248	117.021

Sumber: Kecamatan Soreang Dalam Angka 2017.

Kelurahan Soreang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Soreang yang memiliki potensi industri kain, yang termasuk didalamnya adalah UMKM konveksi. Produk yang dihasilkan UMKM konveksi di Kelurahan Soreang diantaranya: baju muslim, celana jeans, kaos, jaket, baju anak. Sentra UMKM konveksi di Kelurahan Soreang merupakan salah satu sentra industri di Kecamatan Soreang atau bahkan di Kabupaten Bandung yang berpotensi untuk bisa menggerakkan perekonomian rakyat.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif penelitian ini menggambarkan mengenai kondisi sentra UMKM konveksi Soreang saat ini dilihat dari seberapa banyak jumlah unit usaha konveksi saat ini dan bagaimana UMKM konveksi dapat menimbulkan permintaan tenaga kerja, serta metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara modal, upah, jumlah produksi dan lama usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada sentra UMKM konveksi Soreang.

3.3 Definisi dan Oprasional Variabel Penelitian

3.3.1 Definisi Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Variabel Independent, variabel ini yang sering disebut sebagai variabel *stimulus, prediktor, antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini meliputi Modal (M), Upah (U), Jumlah Produksi (JP), Lama Usaha (LU)
2. Variabel Dependen, sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Penyerapan Tenaga Kerja (PTK).

3.3.2 Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel adalah definisi dari variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dan menunjukkan cara pengukuran dari masing – masing variabel tersebut. Pada setiap indikator dihasilkan dari data sekunder dan dari suatu perhitungan terhadap formulasi yang mendasar pada konsep teori. Definisi dan operasional variabel bertujuan untuk menjelaskan makna variabel yang sedang diteliti. Adapun operasional variabel dari penelitian ini dalam bentuk dibawah ini :

Tabel 3.2
Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Operasional Variabel	Satuan
1.	Penyerapan Tenaga Kerja (PTK)	Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pengusaha konveksi di Kelurahan Soreang	Orang / unit usaha
2.	Modal (MJM)	Modal tetap berdasarkan jumlah unit mesin pada setiap unit usaha konveksi di Kelurahan Soreang	Unit / unit usaha
3.	Tingkat Upah (TU)	Nilai uang yang diberikan untuk pekerja dalam bentuk upah pada setiap unit usaha konveksi di Kelurahan Soreang	Rupiah / bulan / orang
4.	Jumlah Produksi (JP)	Jumlah unit output konveksi pada setiap unit usaha konveksi di Kelurahan Soreang	Unit / bulan / unit usaha
5.	Lama Usaha (LU)	Usia usaha setiap unit usaha konveksi di Kelurahan Soreang	Tahun

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2014).

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2014). Sampel adalah bagian dari populasi (Andi Supangat 2007). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan bagian dan jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM konveksi di Kelurahan Soreang, Kabupaten Bandung. Jumlah populasi dari pemilik unit usaha yang ada di Sentra UMKM konveksi di Kelurahan Soreang sebanyak 205 unit usaha (Kecamatan Soreang Dalam Angka Tahun 2016).

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah *probabilty sampling*, pengambilan sampel secara acak sederhana (*Simple Random Sampling*) dengan jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin (Umar, 2011). Perhitungan jumlah sampel penelitian adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N.(e)^2}$$

di mana:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan

Dengan jumlah populasi sebanyak 205 unit usaha dan faktor kesalahan sebesar 10 persen, maka jumlah sampel penelitian adalah sebanyak :

$$n = \frac{205}{1+205 (0,1)^2} = 67.21 \text{ unit usaha}$$

Jadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 67 unit usaha.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara :

1. Studi kepustakaan, merupakan satu cara untuk memperoleh data dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga memperoleh suatu referensi yang dapat digunakan untuk kepentingan penelitian.
2. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dari hasil publikasi lembaga – lembaga, instansi pemerintah, dan organisasi lainnya.
3. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden untuk memperoleh data yang dibutuhkan baik secara terstruktur ataupun tidak terstruktur.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2014).

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua sumber data, yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang bersumber secara langsung dan sumber data penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud digunakan untuk mengetahui faktor internal yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kelurahan Soreang, Kabupaten Bandung.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber secara tidak langsung baik melalui pihak kedua ataupun dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder yang dimaksud digunakan sebagai data literatur yang menjelaskan adanya fenomena penyerapan tenaga kerja mulai dari data jumlah UMKM, jumlah angkatan kerja, dan sebagainya. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung dan Jawa Barat, Dinas Perindag Jawa Barat, dan sumber lainnya seperti media massa dan elektronik.

3.6 Metode Analisis Data yang Digunakan

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Adapun bentuk persamaan regresi linear berganda yang digunakan dapat dirumuskan (Gujarati, 2003) :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{ MJM} + \beta_2 \text{ TU} + \beta_3 \text{ JP} + \beta_4 \text{ LU}$$

Persamaan regresi tersebut selanjutnya diubah kedalam bentuk logaritma natural untuk memudahkan analisis elastisitas penyerapan tenaga kerja. Persamaan regresi dalam bentuk logaritma natural adalah sebagai berikut:

$$\text{LnPTK} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnMJM} + \beta_2 \text{LnTU} + \beta_3 \text{LnJP} + \beta_4 \text{LnLU} + \mu$$

Dimana:

- β_0 = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi
- μ = Faktor Pengganggu
- PTK = Penyerapan Tenaga Kerja (orang)
- MJM = Modal / Jumlah Mesin (unit)
- TU = Tingkat Upah (Rupiah / orang)
- JP = Jumlah Produksi (unit)
- LU = Lama Usaha (Tahun)

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang kemudian disebut dengan asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas Uji Normalitas, Uji Multikoleniaritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur apakah data memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik (statistik inferensial). Pendugaan persamaan dengan menggunakan metode OLS harus memenuhi sifat kenormalan, karena jika tidak normal dapat menyebabkan varians infinitif (ragam tidak hingga atau ragam yang sangat besar). Hasil pendugaan yang memiliki varians infinitif menyebabkan pendugaan dengan metode OLS akan menghasilkan nilai dugaan non meaningful (tidak berarti). Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menguji normalitas adalah *Jarque-Bera (JB) test*. Dengan pengujian hipotesis normalitas sebagai berikut :

- H_0 : Residual berdistribusi normal
- H_1 : Residual tidak berdistribusi normal

Jika $JB > X^2$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sebaliknya jika $JB < X^2$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pada mulanya multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau

semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Tepatnya istilah multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya satu hubungan linier (Gurajati, 2006). Dengan pengujian hipotesis multikolinearitas sebagai berikut:

- H_0 : Tidak terdapat multikolonieritas.
- H_1 : Terdapat multikolonieritas.

Jika nilai koefisien korelasi $> 0,8$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat multikolonieritas, sebaliknya jika nilai koefisien korelasi $< 0,8$ maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat multikolonieritas.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dilakukan beberapa cara sebagai berikut :

1. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi sangat tinggi, tetapi secara individual variabel – variabel bebas tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel – variabel bebas. Jika antara variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,80) mengidentifikasi ada multikolinearitas.
3. Melalui nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF).

H_0 : Tidak Terdapat Multikolinearitas.

H_1 : Terdapat Multikolinearitas.

Dengan kriteria:

Jika Nilai VIF < 10 maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat multikolinearitas. Jika Nilai VIF > 10 maka H_0 ditolak, artinya terdapat multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Prosedur pengujiannya dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

- H_0 : Tidak ada heteroskedastisitas
- H_1 : Ada heteroskedastisitas

Jika $\text{Obs} \cdot R\text{-Squared} > X^2$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sebaliknya jika $\text{Obs} \cdot R\text{-Squared} < X^2$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sebaliknya jika $\text{Prob. Chi-Square} < \alpha$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Breusch-Pagan-Godfrey*.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu dalam model regresi atau dengan kata lain error dari observasi yang satu dipengaruhi oleh error dari observasi yang sebelumnya. Akibat dari adanya autokorelasi dalam model regresi, koefisien regresi yang diperoleh menjadi tidak efisien, artinya tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan koefisien regresi menjadi tidak stabil. Model pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut :

- H_0 = Tidak ada autokorelasi
- H_1 = Terdapat autokorelasi

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dari data residual terlebih dahulu dihitung nilai statistik Durbin-Watson (D-W) :

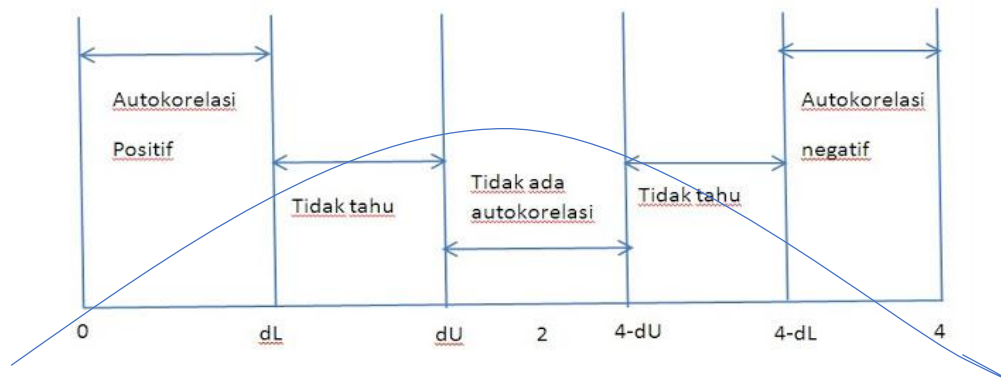
$$D - W = \frac{\sum e_t - e_{t-1}}{\sum e_t^2}$$

Kriteria uji: Bandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel Durbin-Watson:

- a. $D-W < dL$ atau $D-W > 4 - dL$, kesimpulannya pada data tersebut terdapat autokorelasi.
- b. Jika $dU < D-W < 4 - dU$, kesimpulannya pada data tersebut tidak terdapat autokorelasi.
- c. Tidak ada kesimpulan jika: $dL \leq D-W \leq dU$ atau $4 - dU \leq D-W \leq 4 - dL$.

Autokorelasi adalah kondisi variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode lain, dapat dikatakan bahwa variabel gangguan yang tidak random. Ada beberapa penyebab terjadinya autokorelasi, diantaranya kesalahan dalam menentukan model penggunaan lag pada model, tidak memasukkan variabel yang penting autokorelasi ini sendiri mengakibatkan parameter yang di estimasi menjadi bias dan variannya tidak meminimum, sehingga tidak efisien (Bayu Setyoko, 2013).

Masalah autokorelasi dalam model dapat menunjukkan adanya hubungan antara variabel gangguan (*error term*) dalam suatu model. Gejala tersebut dapat terdeteksi melalui Durbin-Watson test (Gurajati, 2013). Durbin-Watson yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam sebuah model regresi. Maka untuk mengetahuinya harus membandingkan antara nilai DW yang dihasilkan dengan nilai DW pada tabel dengan kepercayaan tertentu.



Gambar 3.1 Kurva Durbin Watson

Sumber : Gurajati (2006)

3.6.2 Uji Kriteria Statistik

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menghitung koefisien regresi masing – masing variabel bebas sehingga dapat diketahui pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Gurajati (2002) dalam Devi (2014), adapun prosedur pengujiannya :

a. $H_0 : \beta_i \neq 0$

- Variabel bebas (modal) secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK).
- Variabel bebas (tingkat upah) secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK).
- Variabel bebas (jumlah produksi) secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK).
- Variabel bebas (lama usaha) secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK).

b. $H_1 : \beta_i = 0$

- Variabel bebas (modal) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK).
- Variabel bebas (upah) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK).
- Variabel bebas (jumlah produksi) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK).
- Variabel bebas (lama usaha) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK).

Jika $t_{stat} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya variabel bebas yang tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Namun, jika $t_{stat} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya variabel bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Adapun prosedur yang digunakan

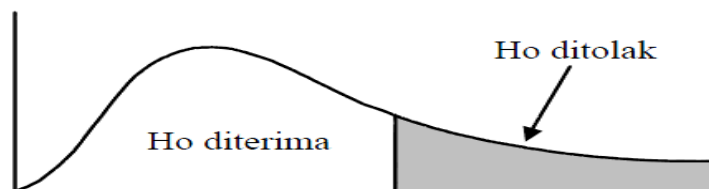
a. $H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$

Variabel bebas (MJM, TU, JP, LU) secara bersamaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat penyerapan tenaga kerja(PTK).

b. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$

Variabel bebas (MJM, TU, JP, LU) secara bersamaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat penyerapan tenaga kerja(PTK).

Apabila $F_{\text{stat}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima yang berarti bahwa variabel bebas secara keseluruhan tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Sedangkan apabila Apabila $F_{\text{stat}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak yang berarti bahwa variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.



Gambar 3.2 Kurva Uji F

Sumber: Gujarati (2006)

3. Koefisien Determinan (R^2)

Nilai R^2 mencerminkan seberapa besar keragaman dari variabel terikat yang dapat diterangkan oleh variabel bebasnya. Nilai R^2 memiliki besaran positif dan kurang dari satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 bernilai nol maka keragaman dari variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya. Sebaliknya, jika nilai R^2 bernilai satu maka keragaman dari variabel terikat secara keseluruhan dapat dijelaskan oleh variabel bebas secara sempurna (Gurajati, 2006).